

BAB II

ERA MEA DAN KESIAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana Masyarakat Ekonomi ASEAN terbentuk dan mempengaruhi beberapa hal dalam pemerintahan di Indonesia, khususnya sektor pemerintahan provinsi. Beberapa hal tersebut adalah mengenai bagaimana proses dari Pemprov Jawa Timur berperan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui praktik dan pengembangan sektor ekonomi pada UMKM. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan beberapa hal mengenai potensi, tantangan, serta urgensi UMKM dalam MEA, juga secara umum profil pengembangan UMKM di yang dilakukan oleh lembaga terkait Pemprov Jawa Timur.

2.1 Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN

Perubahan sistem internasional yang memperbolehkan negara-negara untuk saling bekerja sama demi mencapai tujuan bersama terutama di dalam suatu kawasan telah memberikan dampak yang signifikan aktor internasional. Sistem internasional merupakan sebuah hasil dari hilangnya batas-batas yang ada pada suatu negara, biasa disebut dengan globalisasi.¹ Salah satu dampak dari globalisasi tersebut adalah munculnya berbagai macam bentuk kerjasama regional, baik itu di bidang pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya.

¹Cole, Nicki Lisa, Ph.D. (2019, July 3). What Is the Meaning of Globalization in Sociology? Retrieved from <https://www.thoughtco.com/globalization-definition-3026071>

Type of Sociospatial Links	Period	Forms of Political Organization	Level of Technology
Local links	Up to the second half of the 4 th millennium BCE (=3500 BCE)	Pre-state (simple and medium complexity) political forms, the first complex polities	Hunter-gatherer production principle, beginning of the agrarian production principle
Regional links	The second half of the 4 th millennium BCE – the first half of the 1 st millennium BCE (=3500-490 BCE)	Early states and their analogue: the first empires	The second phase of the agrarian revolution; agrarian production principle reaches its maturity
Continental links	The second half of the 1 st millennium BCE – the late 15 th century CE (=490 BCE – 1492 CE)	Rise of empires and first developed states	Final phase of the agrarian production principle
Intercontinental links	The late 15 th century – the early 19 th century (=1492-1821)	Rise of developed states, first matures states	The first phase of the industrial production principle and industrial revolution
Global links	The early 19 th century – 1960s and 1970s	Mature states and early forms of supranational entities	The second phase of the industrial revolution and the final phase of the industrial production principle
Planetary links	Starting from the last third of the 20 th century	Formation of supranational entities, washing out of state sovereignty, search for new types of political unions and entities, planetary governance forms	The start and development of scientific-information revolution whose second phase is forecasted for the 2030s and 2040s

Tabel 2.1 Klasifikasi Globalisasi²

² Jim Sheffi eld, Andrey Korotayev, & Leonid Grinin, *Globalization: Yesterday, Today, and Tomorrow*, Litchfi eld Park, Emergent Publication, 2013, hal. 6

Salah satu contoh dari kerjasama antar negara di dalam sebuah kawasan adalah ASEAN. ASEAN, mempunyai visi dimana negara-negara anggota harus bersinergi satu sama lain untuk mencapai suatu kawasan yang punya daya saing dalam sistem internasional.³ Untuk mewujudkan visi tersebut pada Bali *concord II* ASEAN telah menyepakati *ASEAN Vision 2020*. ASEAN Vision 2020 sendiri merupakan gagasan yang dibentuk pada KTT ke-5 ASEAN di Bangkok.⁴ Berlangsung pada tanggal 14-15 Desember 1997 KTT ASEAN ke-5 tersebut membahas mengenai upaya-upaya untuk negara di ASEAN saling berintegrasi khususnya negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang saat itu sedang diupayakan masuk sebagai bagian dari ASEAN.⁵

KTT tersebut bertujuan untuk memetakan sebuah visi bagi ASEAN berdasarkan realita dan prospek hari ini dalam beberapa dekade yang mengarah ke Tahun 2020. ASEAN diharapkan memiliki peran yang signifikan ke dunia internasional hidup dalam kedamaian, memiliki stabilitas kesejahteraan, terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan dalam komunitas masyarakat yang saling peduli.⁶ Selain itu, KTT tersebut menghasilkan satu kebijakan yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai pondasi utama dalam menerapkan ASEAN Economic Community yang saat itu berupa rancangan untuk menerapkan ekonomi ASEAN yang terintegrasi, yakni “*Protocol*

³The Association of Southeast Asian Nations, *About Us – ASEAN*, diakses dari The Association of Southeast Asian Nations: <http://ASEAN.org/ASEAN/about-ASEAN/overview/> pada tanggal 7 Desember 2019, pukul 09.26 WIB

⁴ ASEAN Secretariat, *ASEAN Vision 2020*, Jakarta, ASEAN.org, 2012, hal 1 diakses melalui https://asean.org/?static_post=asean-vision-2020 12 November 2019 pukul 13.40 WIB

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*,

to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services”.⁷ Pada ASEAN Framework Agreement of Service, negara-negara anggota ASEAN menindak lanjuti dari integrasi ekonomi Inter-ASEAN untuk meningkatkan daya saing regional terhadap ekonomi global saat itu terutama setelah diterapkannya AFTA pada regional ASEAN. Protokol tersebut memuat sebuah cikal bakal dari *ASEAN Community* yang kita kenal sekarang sebagai bentuk atau cara untuk menempuh visi ASEAN. Dalam *ASEAN Community* terdapat tiga buah pilar untuk mencapai kawasan ASEAN yang maju, salah satunya adalah *ASEAN Economic Community*.⁸

AEC atau yang biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN yang selanjutnya akan disebut MEA, bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas.⁹ ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur perpajakan, dan *e-commerce*. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam). ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global

⁷ Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum RI, *KEPPRES RI NOMOR 53 TAHUN 1998 Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services*, Jakarta, Sekretariat Kabinet RI, 1997, hal.1 diakses melalui <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/5038/kp0531998.htm> 12 November 2019 pukul 13.45 WIB

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi sosial.¹⁰

Sebelum terbentuknya ASEAN Vision 2020, asosiasi regional tersebut memang terfokus pada isu-isu sosial politik dan keamanan karena tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kawasan regional yang damai dan meredam konflik diantara negara-negara anggotanya. ASEAN 6 atau yang dikenal sebagai the founding fathers dari asosiasi tersebut, melihat ideology komunisme yang ada di tiongkok sangat berpengaruh terhadap stabilitas kedaulatan enam negara tersebut, terlebih diantaranya ada Vietnam yang juga sebagai produk komunisme diantara negara-negara demokrasi tersebut. Oleh karena itu ASEAN dibentuk pada awalnya dari faktor pendorong umum bagi semua pemimpin negara pendiri adalah untuk memastikan keamanan masing-masing negara, yang dapat secara efektif diperoleh melalui niat baik dan saling bekerjasama dengan tetangga terdekatnya.¹¹ Mengapa akhirnya integrasi ekonomi menjadi penting bagi negara anggota saat itu, dan melakukan percepatan terhadap ASEAN Vision 2020 dalam sektor ekonomi adalah karena, peningkatan ekonomi China dan India cukup mengancam stabilitas ekonomi pada negara-negara dunia ketiga tersebut menuju abad 21.

Integrasi ekonomi yang termanifestasi di AEC dalam blueprintsnya juga memiliki "*Priority Schedule*" yang mengikat para pihak, dalam empat tahapan 2

¹⁰ AEC Center Indonesia, *Tujuan ASEAN Economic Community*, Jakarta, Direktorat Jendral Kersama ASEAN Kemlu RI, 2009, hal.1 diakses dari <http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/tujuan>, pada tanggal 7 Desember 2018, pukul 09.45 WIB.

¹¹ ASEAN Development Bank, *Evolving ASEAN Vision Reality*, Singapore, ADB, 2019, hal 35 diakses melalui <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/528626/evolving-asean-vision-reality.pdf>

tahun (2008-2015), untuk usaha kolektif tertentu, sebagai tindakan prioritas dalam jangka waktu tertentu.¹² Jika dilihat dari perspektif mengapa Indonesia menyetujui percepatan tersebut adalah karena Indonesia melihat ASEAN sebagai asosiasi yang memiliki potensi batu loncatan seperti layaknya Uni Eropa dalam sinergitas ekonomi. Juga sebagai peningkatan citra dalam aktivisme internasionalnya dalam memajukan kawasan yang berdaya saing dalam tatanan global, terlebih Indonesia merupakan salah satu inisiator dari asosiasi regional ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara inisiator pembentukan ASEAN perlu menjadi contoh dalam penerapan AEC.

Sejak 2014, Indonesia berpartisipasi dalam AEC, dimana masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari berurangnya hambatan *non-tariff* ataupun *tariff* untuk melakukan kegiatan ekonomi pada negara-negara ASEAN. Hambatan *tariff* dan *non tariff* sendiri merupakan sebuah bentuk kebijakan oleh suatu negara dalam melindungi produk dalam negerinya ataupun stabilitas ekonominya terhadap perdagangan internasional.¹³ Hambatan *tariff* adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (custom area), sementara hambatan *non tariff* adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.¹⁴ Dengan adanya hambatan tersebut dalam perdagangan skala regional seperti dalam ASEAN, akan sulit untuk menciptakan

¹² *Ibid*, hal 75.

¹³ Michele Forzley, *The Impact of Tariff and Non-Tariff Barriers on Access to Essential Drugs for the Poorest People*, Washington DC, Global Health Council Policy Brief, 2007, hal.1

¹⁴ *Ibid*,

ekonomi yang terintegrasi antar negara-negara dalam kawasan. Oleh karena itu dalam ASEAN Economic Community membahas mengenai hambatan-hambatan tersebut sebagai upaya untuk mempermudah perdagangan skala ASEAN.

Ada empat karakteristik yang terkandung dalam cetak biru AEC yang saling berkaitan untuk mewujudkan integrasi ekonomi dari wilayah-wilayah Asia Tenggara¹⁵. Pertama, pasar dan basis produksi tunggal, yang terdiri dari lima komponen yaitu pergerakan bebas untuk barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Kedua, wilayah yang memiliki ekonomi berdaya saing tinggi, membangun kebijakan persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, perlindungan hak cipta, pembangunan infrastruktur, penghindaran pajak berganda, dan *e-commerce* untuk mendukung perdagangan on-line antar anggota ASEAN. Ketiga, wilayah yang memiliki pembangunan ekonomi yang berkeadilan, meliputi penembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan inisiatif integrasi ASEAN yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar anggota ASEAN. Keempat, wilayah yang terintegrasi dengan ekonomi global sepenuhnya, yang meliputi pendekatan yang koheren untuk membangun hubungan ekonomi eksternal seperti negosiasi *Free Trade Area (FTA)* dan *Comprehensive Economic Partnership (CEP)* dan meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi dan distribusi global.

¹⁵Muhammad Afdi Nizar, *Laporan Dampak ASEAN Economic Community Terhadap Sektor Industri dan Jasa, Serta Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, hal.5

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam MEA

Disebutkan dalam AEC *blueprint*, UMKM menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan perekonomian yang sinergis. Untuk memperjelas potensi dan urgensi UMKM untuk hadir sebagai pelaku MEA, dapat dianalisa dari kebijakan *tariff barrier* dan *non-tariff barrier*. Diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Agreement) tahun 1992, adalah untuk memulai integrasi ekonomi antar negara ASEAN dalam menghapuskan *tariff barrier* dan *non-barrier* melalui Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme.¹⁶ Yang saat ini juga dikembangkan dalam *Asean Trade In Goods Agreement* (ATIGA) dengan hambatan *tariff* paling tinggi sebesar 5% untuk negara non CMLV, dan fluktuatif untuk negara CMLV.¹⁷ Diperkecilnya hambatan *tariff* dan non *tariff* menjadi salah satu indikator suksesnya MEA untuk dilaksanakan, meskipun masih ada tarif cukai yang berbeda setiap negara khususnya dalam sektor otomotif, energi, minuman beralkohol, dan tembakau.¹⁸ Sejak tahun 2005 tercatat biaya hambatan *tariff* sebesar rata-rata 3.11 di negara ASEAN, dan menurun menjadi hanya 0.20% pada tahun 2017.¹⁹

Dengan adanya penurunan harga hambatan *tariff* setiap tahunnya hingga mencapai 0.20, merupakan peluang sekaligus potensi bagi UMKM untuk mempersiapkan produknya agar dapat bersaing dalam AEC. Pengembangan

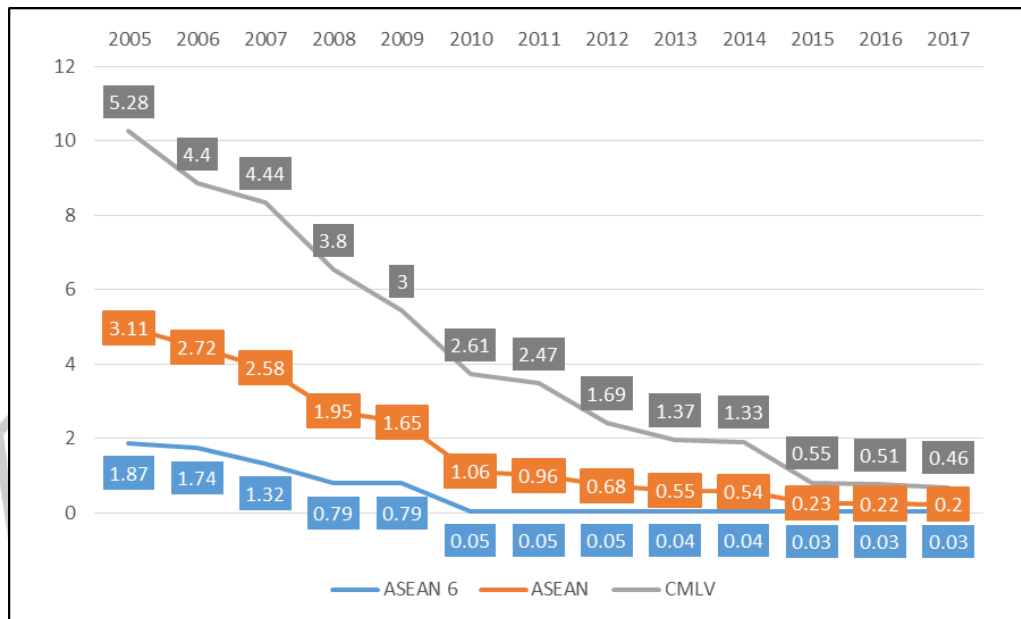
¹⁶Direktorat Jenderal Ekspor Nasional RI, *Indonesia in Freetrade Area, Kementerian Perdagangan RI, 2019*, diakses melalui http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/53-indonesia-in-fta

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Kementerian Keuangan RI, *Kerjasama Cukai ASEAN Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 2016, diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kerjasama-cukai-asean-dalam-rangka-masyarakat-ekonomi-asean/>

¹⁹ASEAN Community Progress Monitoring System, *Tariff Liberalisation*, ASEAN Secretariat, 2018

UMKM perlu mendapatkan perhatian lebih baik dari lapisan pemerintah hingga masyarakat, agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama aktor ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM.



Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Hambatan Tarrif ASEAN 2005-2017

Indonesia punya peran penting dalam *ASEAN Economic Community* (AEC) karena Indonesia adalah salah satu negara inisiator dalam ASEAN. AEC sendiri bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.²⁰

UMKM terkena dampak dari diimplementasikannya *ASEAN Economic Community* di Indonesia. Dengan tujuan dibentuknya pasar tunggal dengan

²⁰Kementerian Perdagangan RI, 2015, *Warta Ekspor: peluang dan tantangan Indonesia pasar bebas ASEAN*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perdagangan, hal. 3.

dihapusnya hambatan *tariff* dan *non-tariff* membuat pertukaran arus barang lebih mudah, yang menjadikan barang yang didistribusikan lebih variatif. Oleh karena itu kegiatan ekspor sangatlah penting untuk tetap menghidupkan eksistensi UMKM guna menguasai pasar di kawasan regional.

“The establishment of the AEC by the end of 2015 will provide a lot of opportunities to the Small Medium Enterprises in ASEAN. However, in order for them to gain benefits from the AEC ASEAN, there is a need for the SMEs to be better connected, better resourced and better engaged.”²¹

Di ASEAN, kerja sama dalam pengembangan UMKM dimulai sejak tahun 1995, ketika mendorong pengembangan UMKM menjadi salah satu bidang prioritas dalam hal fokus kebijakan dan sumber daya. *Small Medium Enterprise Working Group* (SMEWG), yang terdiri dari perwakilan dari lembaga UMKM ASEAN, dibentuk untuk merumuskan kebijakan, program dan mempelopori pelaksanaan inisiatif dan proyek unggulan untuk pengembangan UMKM dan kerja sama di kawasan ini.²² Selain itu, inisiatif yang dilakukan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan penghapusan bea masuk serta hambatan non-tarif juga berdampak dalam memacu pengembangan UMKM.

Di bawah *Strategic Action Plan for SME Development* (2010-2015) atau SAP SMED, sejumlah kegiatan yang berfokus pada pengembangan kapasitas pelaku UMKM serta mendorong hubungan yang lebih besar di antara UMKM di ASEAN telah dilakukan. Beberapa program andalan yang sudah dijalankan bekerja dibawah SAP SMED. Program tersebut antara lainnya adalah ASEAN

²¹ASEAN, 2015, *Small and Medium Enterprises (SMEs): Fostering Competitive and Innovative SMEs in ASEAN*, diakses melalui <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20SME-2.pdf>

²²*Ibid.*

SME Policy Index, yang berfungsi untuk menilai dan memonitor kebijakan serta rangkaian regulasi yang kondusif kepada pelaku UMKM di ASEAN, *ASEAN SME Service Web Portal* dengan jaringan regional, menyediakan informasi penting untuk pelaku UMKM agar dapat menembus pasar regionalnya serta internasional, *ASEAN SME Online Academy* dimana berfungsi sebagai sarana pembelajaran mandiri secara online untuk para pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan pengetahuannya, *ASEAN Guidelines on One Village One Product* (OVOP) untuk mengubah produk lokal menjadi produk yang kompetitif untuk sektor ekspor, dan Beberapa pengetahuan umum mendasar mengenai Kewirausahaan di ASEAN.²³

Merujuk kepada *AEC blueprint*, terdapat empat indikator yang dapat meningkatkan kapasitas UMKM untuk berpartisipasi secara efektif dan proaktif dalam rantai tatanan regional maupun global.²⁴ Pertama, meningkatkan lingkup pembiayaan sektor UMKM pada kawasan untuk memberi manfaat bagi UMKM sendiri, termasuk melalui kolaborasi di antara berbagai kelompok kerja atau pelaku UMKM yang berada dalam wilayah ASEAN. Kedua, memperluas cakupan akses keuangan dan literasi, serta fasilitas perantara dan distribusi, seperti layanan pembayaran digital yang dapat digunakan untuk mempromosikan teknologi pengurangan biaya dan pengembangan layanan keuangan untuk perusahaan yang lebih kecil dan kelompok yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Meningkatkan kesempatan untuk dapat berdiskusi antar pelaku di ASEAN agar dapat mengembangkan praktik yang terbaik dan bertukar informasi

²³*Ibid*, hal 1.

²⁴*Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jakarta, ASEAN Secretariat, 2009, hal.2*

untuk memperkuat kerja sama.

Ketiga, mengintensifkan pelaksanaan program pendidikan keuangan dan mekanisme perlindungan konsumen untuk meningkatkan kapasitas manajemen keuangan dan mendorong penggunaan layanan keuangan. Keempat, mempromosikan perluasan saluran distribusi yang dapat meningkatkan akses serta mengurangi biaya layanan keuangan, termasuk teknologi seluler dan asuransi mikro. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mengedukasi para pelaku bisnis UMKM untuk menghadapi terbukanya pasar global. Menyadari bahwa akses terhadap informasi sangat penting untuk akses pasar dan internasionalisasi UMKM, oleh karena itu serangkaian publikasi telah dirilis terutama Buku Panduan UMKM menuju MEA 2015 dan Direktori UMKM Posisi di ASEAN 2015.

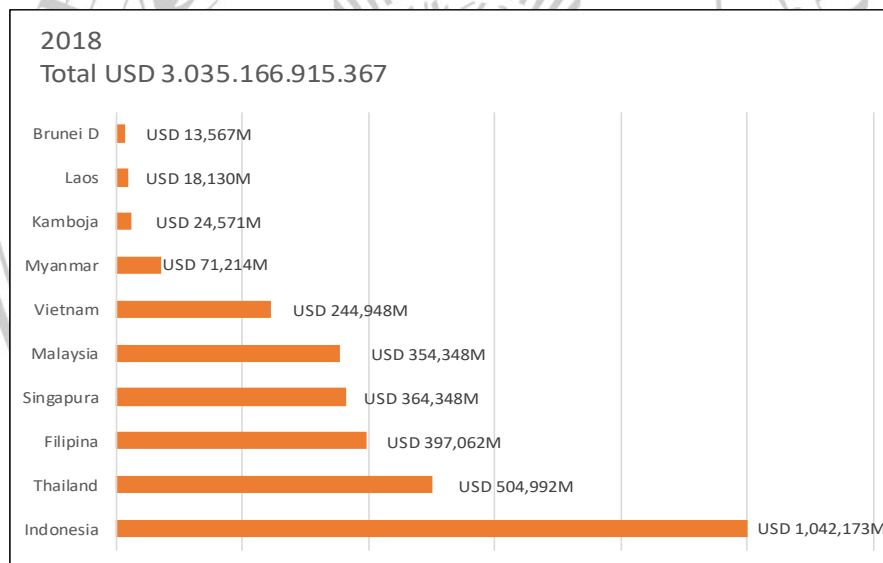
Dengan demikian, permasalahan-permasalahan UMKM yang juga dimiliki oleh Jawa Timur seharusnya bisa dijadikan titik ukur untuk meningkatkan target dan mengembangkan potensi yang telah dipaparkan diatas. UMKM Jawa Timur, memiliki permasalahan terhadap kualitas kinerja yang masih cenderung rendah, memiliki kesamaan dengan analisa permasalahan yang kerap ditemui oleh UMKM karena sifatnya yang cenderung informal.²⁵ Terbatasnya sumber daya seperti akses kepada bantuan finansial yang juga dibutuhkan oleh UMKM, juga hambatan yang ditemukan berupa akses distribusi produk UMKM ke pasar yang dituju. Temuan-temuan inilah, yang dibutuhkan penanganan dalam

²⁵ Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, *RENSTRA Koperasi dan UMKM Jawa Timur 2014-2019*, Surabaya, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2019, hal 32-33.

pengembangan UMKM agar dapat meningkatkan potensinya dikemudian hari. Sehingga UMKM dapat menjadi sumber pendapatan yang produktif, dinilai dari potensi yang bisa dihasilkan.

2.3 Potensi, Tantangan, dan Urgensi Pengembangan UMKM Jawa Timur di Era MEA

Mengetahui beberapa fakta yang telah disebutkan diatas, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara dengan aktifitas perekonomian terbesar di kawasan ASEAN. Menurut data Bank Dunia, perekonomian Indonesia yang diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sebesar US\$ 1.042 triliun atau setara Rp 14.837 triliun pada 2018.²⁶



Gambar 2.2 Grafik PDB Negara-Negara Kawasan ASEAN 1960-2018²⁷

Pengukuran tersebut ditentukan melalui Jumlah penduduk yang sangat besar serta wilayah yang luas, menjadi keunggulan sekaligus tantangan bagi Indonesia

²⁶ Kata Data, *Ekonomi Indonesia Terbesar di Kawasan ASEAN*, Jakarta, 2018, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/26/ekonomi-indonesia-terbesar-di-kawasan-asean>

²⁷ *Ibid.*

dalam pembangunan maupun perekonomiannya. Namun indikator tersebut bukan penentu secara mutlak bahwa Indonesia aman terhadap dinamika stabilitas ekonomi global yg cenderung berubah-ubah. Tahun 1998 Hartarto Sastrosoenarto Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi meratifikasi *Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services* yang tertuang dalam Keppres Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1998 Sebagai cikal bakal integrasi ekonomi yang saat ini terangkum dalam ASEAN Economic Community atau MEA. Keppres tersebut menjadi awal bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan perekonomiannya dalam kawasan regional ASEAN untuk membantu ASEAN menjadi kawasan regional yang berdaya saing global dan tak tergerus oleh kondisi perekonomian dunia yang dinamis.

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang secara geografisnya terletak di antara 111⁰⁰ BT – 114⁰⁴ BT dan 7⁰ 12'LS – 8⁰⁴⁸LS. Jawa Timur sebuah Provinsi yang memiliki luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.²⁸ Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km², dan jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai lebih dari 39 juta jiwa, yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2017.²⁹ Jawa Timur secara administratif terbagi menjadi sembilan kota dengan kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis dalam bidang

²⁸Humas Pemprov Jawa Timur, Sekilas Tentang Jawa Timur, Surabaya, 2013, diakses melalui <https://jatimprov.go.id/read/sekilas-jawa-timur/sekilas-jawa-timur>

²⁹*Ibid.*

industri karena diapit oleh dua provinsi besar yakni Jawa Tengah dan Bali. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah mencapai Rp 922 triliun tahun 2014 dan Rp 1.268 triliun pada tahun 2018³⁰, Pulau Bali menghasilkan PDRB sebesar Rp 156 triliun tahun 2014 dan Rp 234 triliun tahun 2018.³¹ Hal ini menempatkan posisi Jawa Timur menjadi salah satu pusat aktivitas industri maupun perdagangan di Indonesia. Perkembangan perekonomian Jawa Timur yang tercatat oleh Badan Perekonomian Daerah pada tahun 2015 sebesar 5.44 persen mengalami perkembangan menjadi 5.55 persen. Sementara Jawa Timur menyumbang 14.11 persen Pendapatan Daerah Domestik Bruto terhadap Indonesia. Hal ini menjadi konsentrasi oleh pemerintahan Indonesia saat ini untuk mendorong perekonomian tiap-tiap daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, salah satunya adalah UMKM.



Gambar 2.3 Pertumbuhan PDRB Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Jawa Timur

³⁰Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *PDRB Atas Harga Berlaku 2010-2018*, Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019, hal.1

³¹Badan Pusat Statistik Bali, *PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2010-2018*, Bali, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019, hal.1

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia memaparkan data yang tercatat pada tahun 2012 hingga 2013 bahwa sektor UMKM mengalami kenaikan dalam Pendapatan Domestik Bruto (atas harga konstan) yakni sebesar Rp 85,5 miliar.³² Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam krisis ekonomi yang sempat menimpa Indonesia, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.³³ Hal tersebut terjadi dikarenakan sektor mikro, kecil, menengah melakukan aktivitas penjualan langsung dengan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik barang maupun jasa. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja, dan merupakan salah satu indikator keberhasilan ekonomi bagi suatu daerah, jika jumlah UMKM meningkat tiap tahunnya.³⁴

Pada tahun 2017 Provinsi Jawa Timur berada di peringkat kesembilan dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan dari seluruh provinsi di Indonesia. Sementara peringkat kedua dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari seluruh provinsi di Indonesia.³⁵

³²BPS Indonesia, *PDRB Atas Harga Konstan 2010-2018*, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019, hal.1

³³Soekarwo, *Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2018, hal. 55

³⁴Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy*, 2017, hal.5

³⁵Badan Pusat Statistik Indonesia, *Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi 2010-2018*, Jakarta, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018, hal.1

Provinsi	Seri 2010 PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) Harga Konstan Tahun 2017
DKI Jakarta	157,637
Kal-Tim	126,625
Kep.Riau	79,758
Kal-Tara	78,915
Riau	70,755
Papua Barat	62,164
Papua	45,578
Jambi	38,850
Jawa Timur	37,724

Tabel 2.2 PDRB Harga Konstan 2017, BPS Jawa Timur

Tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkapkan bahwa penyumbang terbesar dalam PDB Indonesia pada tahun tersebut adalah pulau Jawa. Dimana berdasarkan data yang penulis peroleh diatas, posisi pertama adalah DKI Jakarta, dan kedua adalah Jawa Timur, menyusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Timur sejak tahun 2010-2017 dicatat dalam PDRB BPS selalu dalam keadaan yang stabil dalam perekonomian Indonesia. Beberapa hal yang telah dipaparkan memperjelas pandangan penulis terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, bahwa dalam pembangunan ekonomi provinsi Jawa Timur unggul dibandingkan dengan beberapa provinsi di sekitarnya. Dengan diberlakukannya AEC pada negara-negara ASEAN, momen ini menjadi penting untuk memperluas cakupan pasar dari UMKM di Jawa Timur yang saat ini sudah menunjukkan kontribusi ekonomi yang besar.

Provinsi	Seri 2010 PDRB per Kapita (Persen) Harga Berlaku Pulau Jawa 2010-2018				
	2010	2012	2014	2016	2018
DKI Jakarta	15.66	15.64	15.79	16.1	16.5
Jawa Timur	14.43	14.32	14.4	14.39	14.4
Jawa Barat	13.21	13.06	13.01	13.11	12.97
Jawa Tengah	9.08	8.85	8.7	8.64	8.64
Banten	3.95	3.91	3.9	3.93	4.01
DI Yogyakarta	0.94	0.91	0.89	0.88	0.87

Tabel 2.3 PDRB Harga Berlaku 2010-2017, BPS Jawa Timur

Disperindag Jawa Timur, sebagai representasi dari Pemprov Jawa Timur, melihat AEC sebagai jalan untuk mendistribusikan produk UMKM yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri.

Per 2018, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indonesia sudah mengimplementasikan *scorecard* keberhasilan AEC sebanyak 85 dari 118 prioritas.³⁶ Dalam ranah lokal, sebagai salah satu contoh, Pemerintah Kota Malang melaksanakan pelatihan UMKM untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pelatihan tersebut, merupakan salah satu dari inisiatif ASEAN untuk mengembangkan UMKM Pertanian di Malang bersama dengan USID, US-ACTI (*United States-ASEAN Connectivity through*

³⁶Kementerian Luar Negeri RI, *Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 2019 diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea

Trade and Investment).³⁷ Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk mengarahkan pelaku UMKM di sektor pertanian dalam memanfaatkan pengelolaan produk, dan pemanfaatan pemasaran melalui platform *online*.

Dalam sebuah wawancara oleh Republika, Soekarwo menyatakan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sejak 2014 hingga 2018.³⁸ Pada 2014, PAD Jatim mencapai Rp 14,44 triliun lebih. Kemudian meningkat 6,65 persen menjadi Rp 15,40 triliun lebih pada setahun berikutnya. Lalu pada 2016 jumlahnya kembali meningkat 3,14 persen menjadi lebih dari Rp 15,58 triliun. Berikutnya, pada 2017 jumlahnya mencapai 9,07 persen atau senilai Rp 17,32 triliun. Bahkan di 2018 semester awal mencapai sebesar Rp 8,49 triliun lebih.³⁹ Hal ini menegaskan bahwa potensi yang dimiliki UMKM dalam sektor daerah sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM masih berfokus pada persoalan menjaga stabilitas ekonomi yang harus terus ditingkatkan melalui peningkatan SDM ataupun kualitas produknya. Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Promosi Perdagangan Internasional, Lucky Kapas, diketahui bahwa tantangan yang dihadapi oleh UMKM masih ada di seputar kualitas SDM dan kuantitas produksi yang belum bisa tersedia dalam jumlah banyak.

Selain tantangan pada sumber daya manusia, Soekarwo juga mengatakan

³⁷ Sekretariat Nasional ASEAN, *Tingkatkan Daya Saing Sektor Pertanian melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 2018 diakses melalui <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/tingkatkan-daya-saing-sektor-pertanian-melalui-masyarakat-ekonomi-asean>

³⁸ Andi Nur Aminah, Soekarwo: PAD Jatim Tumbuh Sejak 2014, Surabaya, *Rapublika(dot)co(dot)id*, 2018, hal.1

³⁹ *Ibid*, hal.1

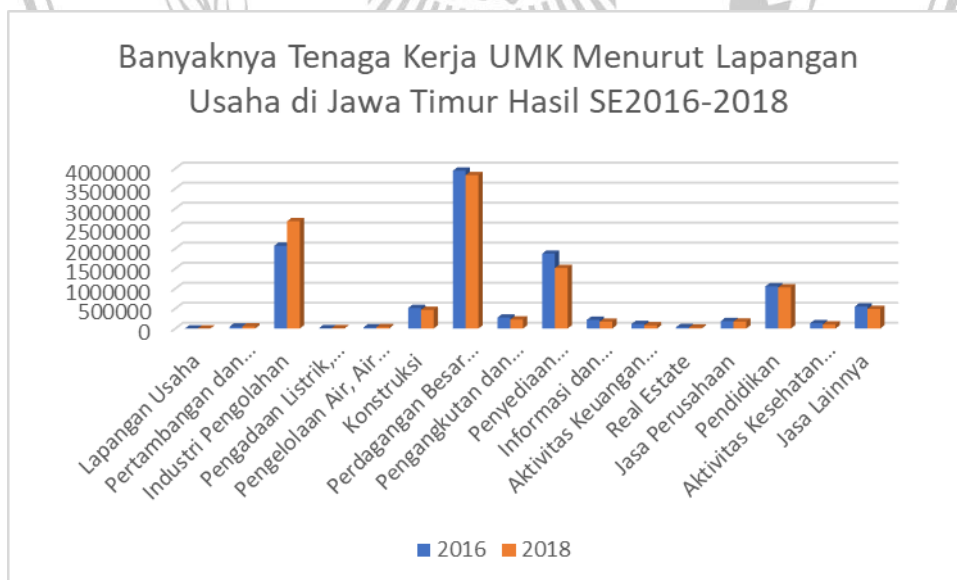
bahwa UMKM dipilih karena memiliki jumlah yang banyak di Jawa Timur, yaitu sebanyak 600.000 lebih UMKM. Didalamnya terdapat 95% tenaga kerja yang bergantung pada usaha-usaha rumahan tersebut. Fenomena ini menimbulkan banyaknya tenaga kerja yang akan terserap oleh UMKM jika pengembangannya tepat. Selain itu, fasilitas peminjaman yang disubsidi oleh pemerintah secara tepat sasaran, juga dibutuhkan. Oleh karena itu perlunya intervensi dari pemerintah untuk melindungi dan memfasilitasi UMKM. Selain itu pameran-pameran yang ditargetkan untuk mempromosikan produk-produk dari UMKM ini akan semakin diperbanyak, dan diperluas cakupan wilayahnya.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Tugas dan Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masuk dalam kategori Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar atau wajib diselenggarakan oleh daerah. Oleh karena itu, untuk kewenangan terhadap pengembangan UMKM serta kebijakan terkait pengembangan menjadi wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakannya. UMKM pada sektor penerapan kerja selama lima tahun dari tahun 2008 hingga 2013, sudah berhasil menyerap hingga lebih dari 104 ribu tenaga kerja dalam skala nasional.⁴⁰ Oleh karena itu signifikasi UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

⁴⁰ BPS Indonesia, *Tabel Perkembangan UMKM 1997-2013*, Jakarta, diakses melalui, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1322/tabel-perkembangan-umkm-pada-periode-1997--2013.html> pada 2 Desember 2019 pukul 20.15

Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	
	2016	2018
Pertambangan dan Penggalian	49.032	52.324
Industri Pengolahan	2.069.643	2.680.392
Pengadaan Listrik, Gas, Air Panas dan Udara Dingin	7.847	8.396
Pengelolaan Air, Air Limbah, Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	29.515	35.477
Konstruksi	514.096	465.452
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3.942.720	3.830.249
Pengangkutan dan Pergudangan	275.435	226.617
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.870.618	1.511.032
Informasi dan Komunikasi	216.137	170.830
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	112.560	80.131
Real Estate	35.573	24.570
Jasa Perusahaan	183.910	173.974
Pendidikan	1.054.730	1.026.449
Aktivitas Kesehatan Manusia, Aktivitas Sosial	131.807	102.259
Jasa Lainnya	548.443	490.810
Total	11.044.082	10.880.980

Tabel 2.4 Banyaknya Tenaga Kerja UMK Menurut Lapangan Usaha di Jawa Timur Hasil SE2016-2018



Gambar 2.4 Banyaknya Tenaga Kerja UMK Menurut Lapangan Usaha di Jawa Timur Hasil SE2016-2018

Wacana untuk mengembangkan sektor UMKM menjadi relevan untuk terus dikemukakan ke seluruh daerah di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Pada tahun 2012 UMKM di Jawa Timur yang hingga saat ini berjumlah lebih dari 6 juta UMKM diselur penjuru Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis untuk menyerap tenaga kerja.⁴¹ Terlebih, sektor UMKM merupakan sektor informal yang prosesnya tidak terlalu rumit dan dapat berdampak langsung dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekaligus.

Sektor UMKM	Jumlah UMKM
Pertanian	4.112.443
Pertambangan	26.680
Industri Pengolahan	356.047
Listrik, Gas, dan Air	12
Konstruksi	16.789
Perdagangan Hotel dan Restoran	1.720.042
Transportasi	174.541
Keuangan	8.035
Jasa-Jasa	411.342
Jumlah	6.825.931

Tabel 2.5 Jumlah UMKM Jawa Timur Menurut Sektor UMKM Tahun 2012

Untuk mengetahui peran UMKM Indonesia khususnya UMKM yang ada di provinsi Jawa Timur, perlu adanya indikator yang penulis bagi ke dalam tiga kelompok.⁴² Yakni potensi yang dimiliki UMKM, tantangan yang akan dihadapi

⁴¹ Dinkop UMKM Jatim, *Jumlah UMKM Menurut Lapangan Usaha 2016*, Surabaya, Humas Dinkop UMKM Jatim, 2017, hal.1

⁴²M. Z. Abidin, *Kebijakan Fiskal dan Peningkatan Peran Ekonomi UMKM*, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015, hal 1.

oleh UMKM, hingga seberapa besar urgensi UMKM tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada sub-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa karena adanya bunga dari bank yang besar terhadap peminjaman modal untuk pengusaha mikro, kecil, menengah, pemerintah perlu mengadakan intervensi untuk melindungi pengusaha tersebut. Pemerintah akhirnya memberikan fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fasilitas yang diberikan tersebut menambah peluang membuka usaha pegiat UMKM mendapatkan kredit dengan bunga rendah, dari 22-23 persen menjadi 12 persen. Hal ini diberlakukan juga untuk sektor provinsi. Saat ini, Indonesia sudah masuk dalam praktik perdagangan bebas, dimana adanya keterbukaan dalam praktik jual beli. Hal ini menyebabkan terbukanya peluang akses aktivitas jual beli dalam skala besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Situasi ini juga memiliki dampak terhadap pelaku usaha di sektor domestik, yang mana UMKM termasuk di dalamnya.

Praktik UMKM yang terus didukung oleh pemerintah serta sektor terkait dapat meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya intervensi dari pemerintah berupa penurunan bunga bank untuk pelaku UMKM inilah yang berdampak besar pada peluang pengusaha untuk memulai bisnisnya. Hal ini juga diterapkan pada sektor domestik Jawa Timur oleh Soekarwo, dimana yang awalnya bunga bank sebesar 14% diturunkan menjadi 6% dengan memanfaatkan pembelanjaan APBD untuk UMKM. Potensi yang dihasilkan adalah selain memperbanyak peluang membuka usaha bagi para pengusaha skala

kecil juga dapat menjangkau tenaga kerja produktif di daerah dan mengurangi tingkat pengangguran.

Peluang yang tersedia untuk UMKM terlihat melalui produk yang memiliki keunggulan kompetitif dapat dimaksimalkan melalui peningkatan kualitas produk, operasi yang efisien, serta dapat menumbuhkan ekspor mereka, sehingga dapat mendorong pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, UMKM akan membutuhkan dukungan yang besar jika mereka ingin memanfaatkan *ASEAN Economic Community* secara menyeluruh. Pembuat kebijakan, badan perdagangan, dan agen perusahaan, dan lain sebagainya semua memiliki posisi penting untuk membuat kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini merupakan beberapa masalah yang dipertimbangkan dalam pengembangan UMKM di ASEAN. Menurut Rosana Mirkovic, Kepala Bagian Kebijakan SME di ACCA, diberlakukannya *ASEAN Economic Community* menawarkan peluang untuk menurunkan hambatan perdagangan dalam wilayah regional dimana adanya UMKM akan sangat menguntungkan.

“It is now widely acknowledged that SMEs play a crucial role in economies worldwide, being responsible for a large share of employment, innovation and economic growth. However, SME export activity has historically been lower than that of their larger counterparts”⁴³

Melalui hal-hal tersebut peluang yang dimiliki UMKM semakin diperjelas, jika dari diberlakukannya *One Village One Product* dalam standarisasi yang dibuat oleh ASEAN, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat meyakinkan untuk

⁴³Association of Chartered Certified Accountants, *The AEC creates both opportunities and challenges for ASEAN SMEs*, 2016, diakses melalui <http://www.accaglobal.com/gb/en/member/member/accounting-business/2016/11-12/in-focus/sg-f-smes.html> pada 22 Mei 2018 pukul 20.09

memasarkan produk-produknya. Sumber Daya Alam yang sudah memiliki proporsi pada masing-masing daerahnya, menjadikan hal tersebut sebagai indikator keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Fakta-fakta akan potensi UMKM yang tiap tahun semakin terealisasi manfaatnya terhadap perekonomian ini, menimbulkan urgensi bagi pengembangan dan keberadaan UMKM di Indonesia, terutama sektor domestik Jawa Timur. Pada 2014 pemerintah melakukan upaya-upaya dalam sinergitas ekonomi ini melalui sebuah konsep Jawa Timur Incorporated yang disebut *Jatimnomics*. *Jatimnomics* merupakan gagasan yang dicetuskan Soekarwo Gubernur Jawa Timur 2014-2019, yang mengadaptasi dari kebijakan fiskal Shinzo Abe untuk Jepang yaitu *Abenomics*. *Jatimnomics* berfokus pada peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan ekonomi masyarakat Jawa Timur. Dalam pengimplementasian *Jatimnomics* ada beberapa program yang mendukung UMKM. Contohnya adalah berdirinya *Jatim Mart* oleh pemprov Jawa Timur sebagai distributor UMKM terpilih Jawa Timur di pasar ASEAN, dibentuknya *e-catalogue* untuk menjual produk-produk UMKM secara satu pintu, juga bekerjasama dengan *e-commerce* untuk bersinergi dalam memperluas penjualan produk UMKM sampai ke pasar luar negeri.